KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Perbaiki akurasi data: DPR Yakin pemerintah sempurnakan DTSEN
Tanggal : Rabu, 02 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perbaiki Akurasi Data

DPR Yakin Pemerintah Sempurnakan DTSEN

KETUA Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendukung langkah Pemerintah melakukan pembenahan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Upaya tersebut mencakup pengukuran ulang sejumlah parameter yang digunakan untuk menggambarkan dan menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

"Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi data. Termasuk data desil yang selama ini menjadi salah satu acuan dalam menentukan penerima berbagai program perlindungan sosial," ujar Misbakhun di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Sebelumnya, masyarakat banyak mengeluhkan desil dalam DTSEN yang kurang akurat. Sistem pemeringkatan kesejahteraan warga oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai perlu diperbaiki agar tidak membingungkan masyarakat dan dapat menjadi salah satu rujukan yang akurat dalam pengambilan keputusan.

Misbakhun melanjutkan, pembenahan dan penyempurnaan data menjadi langkah penting agar berbagai kebijakan Pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Hal tersebut terutama berkaitan dengan program subsidi, perlindungan sosial, serta bantuan sosial (bansos).

Pemerintah, kata Misbakhun, saat ini tengah melakukan pendataan melalui sensus ekonomi secara lebih terperinci. Proses tersebut turut mencakup kalibrasi ulang terhadap baseline Produk Domestik Bruto (PDB). "Jadi saat ini Pemerintah sangat detail dalam hal melakukan sensus ekonomi," ucap politisi Golkar ini.

Selain itu, ia menyoroti data desil yang saat ini banyak dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, desil selama ini digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima program perlindungan sosial. Oleh karena itu, akurasi data menjadi faktor penting untuk memastikan anggaran negara yang telah dialokasikan bagi berbagai program tersebut dapat digunakan secara efektif dan tidak salah sasaran.

"Ini yang sedang kita perbaiki bersama. Jangan sampai kemudian negara sudah menggelontorkan uang yang nilainya sampai ribuan triliun itu kemudian tidak tepat sasaran," kata legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini, mengingatkan.

Senada, anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna menambahkan, persoalan desil yang dikeluhkan masyarakat saat ini menunjukkan pemeringkatan kesejahteraan tidak dapat menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bansos. Kondisi seperti kehilangan pekerjaan, gagal panen, sakit berat, disabilitas, maupun meninggalnya pencari nafkah utama dapat mengubah kemampuan ekonomi keluarga secara cepat.

Karena itu, ia meminta Pemerintah memperkuat mekanisme koreksi DTSEN agar perubahan kondisi masyarakat dapat segera tercermin dalam penyaluran bansos. ■ TIF